



Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Anggaran Sebagai Upaya Mewujudkan Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas

(Studi Kasus Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2024)

Amadhea Virdiana Phita^{1*}, Iqbal Noor², Acep Suherman³

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: virdianaphita@gmail.com

Abstract. To create relevant and accurate information, the Ministry of Home Affairs designed an application, namely the Regional Government Information System (SIPD) as an integrated application that is useful for improving coordination between the central government and local governments. This study aims to analyze the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in budget management at the Sukabumi Regency Transportation Service, especially in the Sea Transportation and ASDP Sector, as an effort to realize efficiency, transparency, and accountability. The research method used is qualitative with a descriptive approach, using purposive sampling and triangulation data collection techniques (observation, interviews, and documentation). The results of the study indicate that SIPD plays a significant role in increasing efficiency through the integration of the planning process to budget reporting, transparency through digital documentation that can be accessed by the public, and accountability through standardized audit trails and financial reporting. However, challenges such as apparatus resistance, limited standard price input, and repeated document revisions still hinder system optimization. This study recommends increasing human resource capacity, better data integration, and intensive socialization to strengthen the implementation of SIPD.

Keywords: Accountability; Budget Management; Department of Transportation; Efficiency; SIPD.

Abstrak. Untuk menciptakan suatu informasi yang relevan dan akurat, Kemendagri merancang sebuah aplikasi yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai suatu aplikasi terintegrasi yang berguna untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan anggaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, khususnya pada Bidang Perhubungan Laut dan ASDP, sebagai upaya mewujudkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data purposive sampling dan triangulasi (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD berperan signifikan dalam meningkatkan efisiensi melalui integrasi proses perencanaan hingga pelaporan anggaran, transparansi melalui dokumentasi digital yang dapat diakses publik, serta akuntabilitas melalui jejak audit dan pelaporan keuangan yang terstandarisasi. Namun, tantangan seperti resistensi aparatur, keterbatasan input standar harga, dan revisi dokumen berulang masih menghambat optimalisasi sistem. Studi ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM, integrasi data yang lebih baik, dan sosialisasi intensif untuk memperkuat implementasi SIPD.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Dinas Perhubungan; Efisiensi; Pengelolaan Anggaran; SIPD.

1. PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat mengharuskan manusia untuk menciptakan inovasi-inovasi secara berkelanjutan demi memberikan manfaat dan kemudahan bagi penggunaannya dari berbagai sektor. Salah satu pengguna teknologi informasi dan komunikasi adalah sektor pemerintahan. Transformasi teknologi informasi kini telah menjadi elemen krusial dalam pembangunan dan kemajuan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di sektor pemerintahan. Pemerintah daerah, sebagai ujung tombak pelayanan publik, dituntut untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam mengelola sumber daya, termasuk anggaran.

Pengelolaan anggaran yang efisien, transparan, dan akuntabel akan menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan telah berjalan dengan baik. Salah satu inisiatif yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). SIPD dirancang sebagai platform terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan dan penganggaran, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta dengan pemanfaatan SIPD akan memudahkan pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan anggaran bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu, SIPD bermanfaat dalam menyediakan informasi yang saling terhubung dalam meningkatkan tata kelola pemerintah yang lebih baik.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan inovasi sebagai pengganti Sistem Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA fokus pada pengelolaan keuangan daerah, termasuk akuntansi dan pelaporan keuangan, tetapi cakupannya terbatas pada aspek-aspek tertentu seperti penganggaran dan akuntansi. Sedangkan SIPD mencakup perencanaan pembangunan, pengawasan, dan pelaporan kinerja. Sehingga SIPD dinilai sebagai sistem yang terintegrasi yang lebih komprehensif dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, sejak 27 September 2019 SIPD mulai diberlakukan. SIPD ini diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 yang merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 Pasal 391, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan informasi pemerintah daerah.

Kabupaten Sukabumi, sebagai salah satu daerah dengan potensi maritim yang cukup besar di Jawa Barat, memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan transportasi laut. Dengan panjang garis pantai mencapai sekitar 117 km, Kabupaten Sukabumi memiliki beberapa pelabuhan tradisional dan potensi pengembangan transportasi laut yang signifikan. Namun, infrastruktur transportasi laut di daerah ini masih belum optimal. Beberapa pelabuhan tradisional seperti Pelabuhan Cisolok dan Pelabuhan Pelabuhan Ratu masih menghadapi masalah seperti kurangnya fasilitas penunjang, keterbatasan kapasitas, dan minimnya sistem pengawasan keselamatan pelayaran. Selain itu, mobilitas masyarakat di wilayah pesisir masih sangat bergantung pada transportasi laut, terutama untuk distribusi barang dan jasa.

Kondisi ini menuntut Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi untuk mengelola anggaran secara lebih efisien dan transparan guna mendukung pembangunan infrastruktur transportasi laut yang lebih baik. Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, terutama di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi khususnya Bidang Perhubungan Laut dan ASDP (Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan).

Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada pengelolaan anggaran di Dinas Perhubungan memiliki tujuan khusus untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dapat memastikan alokasi dana dilakukan secara tepat sasaran, efektif, dan efisien sesuai dengan prioritas pembangunan sektor transportasi. Sistem Informasi Pemerintah Daerah juga dapat memastikan bahwa pengalokasian anggaran dapat terserap secara maksimal dan digunakan sebagai upaya mewujudkan tujuan organisasi. Sistem Informasi Pemerintah Daerah akan membantu Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi dalam memastikan bahwa realisasi anggaran telah selaras dengan rencana anggaran yang telah disusun, serta menjadi salah satu cara untuk mengidentifikasi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam anggaran.

Dalam penerapan SIPD, pengelolaan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi menghadapi beberapa hambatan, terutama dalam perencanaan dan realisasinya. Pada perencanaan anggaran, fenomena yang ditemukan adalah komponen standar harga yang belum terinput ke dalam SIPD. Tanpa acuan harga yang baku, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) menjadi tidak terstandarisasi. Hal ini dapat memicu ketidakefisienan anggaran. Jika standar harga tidak terinput ke dalam SIPD akan membuat proses pengadaan barang/jasa terhambat, karena tidak adanya benchmark harga resmi membuat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) kesulitan mengevaluasi penawaran, akibatnya proses lelang bisa tertunda bahkan dibatalkan karena ketidakwajaran harga. Jika hal ini berlangsung cukup lama, dapat melemahkan akuntabilitas perencanaan daerah, mengurangi kepercayaan publik, dan menghambat pembangunan infrastruktur maupun pelayanan dasar.

Pada realisasi anggaran Dinas Perhubungan, khususnya pada belanja modal infrastruktur perhubungan yang sering kali tidak mencapai target yang direncanakan. Fenomena yang ditemukan adalah adanya keterlambatan proses lelang, perubahan spesifikasi teknis, standarisasi biaya di lapangan terjadi perubahan sehingga tidak sesuai dengan standar biaya umum dan standar biaya khusus yang mengakibatkan banyak terjadi perubahan dokumen penganggaran, dan kendala administratif menjadi faktor signifikan yang menghambat realisasi anggaran, khususnya pada modal belanja.

Proses lelang di Dishub Kabupaten Sukabumi seringkali terhambat oleh persiapan dokumen teknis yang memakan waktu, seperti penyusunan spesifikasi teknis infrastruktur perhubungan yang kompleks. Selain itu, revisi Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang berulang akibat perubahan prioritas atau penyesuaian anggaran serta perpanjangan proses persiapan lelang. Koordinasi yang belum optimal antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) juga sering menimbulkan terjadinya jadwal

pelaksanaan lelang. Keterlambatan proses lelang ini akan berdampak langsung pada rendahnya realisasi anggaran, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur perhubungan seperti pembangunan terminal, pengadaan rambu lalu lintas, atau pengembangan sistem transportasi cerdas. Hal ini akhirnya akan menghambat pencapaian target kinerja Dishub dalam mendukung mobilitas dan konektivitas wilayah.

Perubahan spesifikasi teknis terjadi ketika material atau desain proyek diubah setelah anggaran disetujui. Hal ini disebabkan analisis awal yang kurang matang, seperti survei lokasi atau studi kelayakan yang tidak mendetail, adanya tekanan politik, di mana intervensi pejabat atau pemangku kepentingan memaksa perubahan mendadak, dan ketidakstabilan harga material, seperti kenaikan harga besi yang memaksa penyesuaian desain. Perubahan ini akan berdampak pada revisi dokumen RKA secara terus menerus yang akan memakan waktu dan berpotensi mengganggu jadwal proyek. Selain itu, risiko pelanggaran kontrak atau tuntutan hukum dari penyedia jasa juga meningkat jika perubahan tidak dikelola dengan transparan dan sesuai prosedur.

Dengan diterapkannya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berpotensi memberikan solusi signifikan terhadap permasalahan perencanaan anggaran dan realisasinya, serta permasalahan pada proses lelang di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. SIPD memungkinkan integrasi data perencanaan anggaran dengan sistem pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat mempercepat proses penyusunan dan persetujuan dokumen lelang. Dengan membuat Rencana Umum Pengadaan (RUP) dapat langsung tersinkronisasi dengan dokumen perencanaan anggaran, dan mengurangi kesalahan input serta revisi berulang-ulang. SIPD menyediakan fitur monitoring dan evaluasi real-time, sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi dapat memantau tonggak penting dalam proses pengelolaan anggaran dan mengidentifikasi potensi keterlambatan sejak dini, sehingga tindakan korektif dapat segera diambil sebelum terjadi penundaan yang signifikan.

Meskipun SIPD menawarkan banyak manfaat, implementasinya di Kabupaten Sukabumi masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam mengoperasikan sistem ini. Selain itu, resistensi dari aparatur terhadap perubahan sistem juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pelatihan dan sosialisasi yang intensif kepada seluruh staf yang terlibat dalam pengelolaan anggaran. Dengan demikian, diharapkan implementasi SIPD dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak positif bagi pengelolaan anggaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan fenomena masalah yang diungkapkan di atas, studi ini memiliki tujuan untuk:

- a. Untuk menganalisis pengelolaan anggaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi.
- b. Untuk menganalisis implementasi SIPD dalam pengelolaan anggaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi periode 2021-2024.
- c. Untuk menganalisis implementasi prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran berbasis SIPD di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi periode 2021-2024.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Implementasi Kebijakan

Kata implementasi berasal dari Bahasa Inggris “to implement” memiliki arti mengimplementasikan. Sehingga dapat dijelaskan bahwa implementasi adalah penyedia fasilitas untuk melakukan suatu kegiatan yang akan menghasilkan pengaruh atau konsekuensi terhadap sesuatu (Karla, et al., 2020). Dapat dikatakan bahwa implementasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah dan pihak terkait untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.

Kebijakan publik yang baik tidak akan berarti apa-apa jika tidak diimplementasikan dengan efektif. Pada tahun 1975, Donal S. Van Meter dan Carl E. Van Horn merumuskan model kebijakan yang menekankan pada hubungan antara kebijakan dan kinerja pelaksanaannya. Teori ini dikenal dengan “The Policy Implementation Process Model” fokus analisis ditujukan pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan.

Berikut ini, 6 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan berdasarkan perspektif teori Van Meter and Van Horn:

- a. Standar dan tujuan kebijakan (policy standards and objectives), yaitu kejelasan dan konsistensi tujuan kebijakan yang menentukan keberhasilan implementasi.
- b. Sumber daya (resources), yaitu unsur-unsur yang memenuhi kebutuhan implementasi, termasuk anggaran, SDM, teknologi, dan infrastruktur.
- c. Komunikasi antar organisasi (interorganizational communication), koordinasi antara lembaga pelaksana harus efektif agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik.

- d. Karakteristik agen pelaksana (characteristics of implementing agencies), artinya kapasitas birokrasi, struktur organisasi, dan budaya kerja mempengaruhi implementasi.
- e. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik (social, economic, and political conditions), faktor eksternal seperti dukungan publik, kondisi ekonomi, dan tekanan politik memiliki pengaruh pada implementasi suatu kebijakan.
- f. Disposisi pelaksana (disposition of implementers), yaitu sikap dan motivasi aparat pelaksana yang dimiliki implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.

Teori implementasi Van Meter dan Van Horn memberikan kerangka analisis yang relevan untuk mengevaluasi penerapan SIPD di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini dapat mengukur sejauh mana tujuan kebijakan (efisiensi, transparansi, akuntabilitas) tercapai dengan menilai ketersediaan sumber daya, koordinasi antar instansi, kapasitas SDM, pengaruh lingkungan eksternal, serta sikap pelaksana khususnya di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah sebuah platform digital yang dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung pengelolaan keuangan yang meliputi proses perencanaan anggaran, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam satu sistem terpadu. Sistem ini menjadi tulang punggung digitalisasi tata kelola pemerintah daerah di Indonesia. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2022, SIPD merupakan sistem elektronik yang menyediakan layanan data, informasi, dan proses kerja pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.

Tujuan dikelolanya SIPD adalah agar Pengelolaan Informasi Daerah dapat dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel seperti yang terdapat di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan informasi Pemerintah Daerah terkait informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah, serta dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintah Daerah lainnya. Sehingga terbitlah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengatur teknis pengelolaan SIPD yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah, industri, dan masyarakat saat ini.

Pengelolaan Anggaran Sektor Publik Berdasarkan Prinsip Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas

Anggaran adalah rencana keuangan yang disusun secara sistematis untuk suatu periode tertentu, mencakup estimasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, baik untuk sektor publik maupun swasta (Halim & Kusufi, 2019). Pendapat tersebut dipertegas oleh Mardiasmo (2022), bahwa anggaran (budget) adalah sebuah proyeksi mengenai pendapatan dan belanja yang direncanakan untuk suatu periode mendatang, disertai dengan realisasi anggaran dari periode sebelumnya. Pengelolaan anggaran daerah merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan kinerja organisasi dan mewujudkan tujuan pembangunan. Pada sektor publik pengelolaan anggaran daerah meliputi, proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penggunaan dana publik untuk mencapai tujuan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2018). Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan sektor transportasi, termasuk Bidang Perhubungan Laut dan ASDP, mengalami transformasi pengelolaan anggaran dari sistem tradisional menuju sistem berbasis kinerja dan digital melalui implementasi SIPD.

Pengelolaan anggaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, khususnya pada bidang Perhubungan Laut dan ASDP (Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan), dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pengelolaan APBD. Berikut adalah tahapan dan mekanisme pengelolaan anggaran di bidang tersebut:

- a. Perencanaan Anggaran
 - 1) Penyusunan Rencana Kerja (Renja): Bidang Perhubungan Laut dan ASDP menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebutuhan operasional, program prioritas daerah, dan kebijakan dinas.
 - 2) Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan): Kegiatan dan anggaran dibahas dalam forum musrenbang untuk diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan visi-misi pemerintah daerah.
 - 3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), artinya anggaran dirinci per kegiatan dan diserahkan ke PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) untuk dibahas dalam APBD.

b. Penetapan APBD

- 1) Rancangan APBD yang telah disetujui oleh Bupati dibahas bersama DPRD Kabupaten Sukabumi untuk disahkan menjadi Perda APBD.
- 2) Bidang Perhubungan Laut dan ASDP mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan program yang telah direncanakan.

c. Pelaksanaan Anggaran

- 1) Pencairan Dana: Dilakukan melalui mekanisme SPJ (Surat Pertanggungjawaban) sesuai dengan DIPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) atau dokumen sejenis di tingkat kabupaten.
- 2) Penggunaan Anggaran, digunakan untuk kegiatan yang meliputi:
 - a) Operasional pelabuhan dan dermaga.
 - b) Pemeliharaan sarana-prasarana perhubungan laut.
 - c) Pengawasan keselamatan pelayaran.
 - d) Peningkatan pelayanan ASDP.
 - e) Pelatihan SDM di sektor perhubungan laut.

d. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Pelaporan Keuangan: Dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan) kepada PPKD dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
- 2) Audit Internal/External: Pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah atau BPK untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai aturan.
- 3) Evaluasi Kinerja: Dilakukan untuk menilai pencapaian target program dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, penganggaran daerah harus mengacu pada 3 prinsip, yaitu efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menghasilkan output maksimal dengan input minimal atau mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya terendah (anggaran, waktu, tenaga) tanpa mengorbankan kualitas (Mardiasmo, 2018). Efisiensi mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengurangan biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas output yang dihasilkan.

Pada SIPD menyediakan analisis cost-benefit untuk membandingkan usulan anggaran. Sehingga alokasi anggaran sesuai prioritas pembangunan. Peran SIPD dalam efisiensi adalah mengurangi kesalahan manual (human error) dalam penghitungan anggaran, serta memangkas waktu penyusunan laporan (contoh: laporan triwulanan yang biasanya 2 minggu jadi 3 hari).

Beberapa cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran melalui pemanfaatan SIPD meliputi, SIPD membuat perencanaan anggaran lebih matang, pengawasan yang lebih ketat, serta adanya fitur untuk evaluasi secara berkala.

Transparansi dalam pengelolaan anggaran mengharuskan seluruh proses pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan tersedia secara terbuka dan dapat diakses publik, termasuk dokumen anggaran, alokasi dana, dan hasil audit. Selain itu, transparansi juga melibatkan pengambilan keputusan yang inklusif, di mana masyarakat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Beberapa cara untuk meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran meliputi, Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), penyebaran informasi melalui media, platfor digital untuk mempublikasikan laporan keuangan, serta sosialisasi dan edukasi.

Akuntabilitas pengelolaan anggaran mengharuskan pemerintah daerah mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat, sesuai tujuan, regulasi, dan standar kerja. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2022, pemerintah wajib menyusun laporan keuangan seperti LRA, LPSAL, Neraca, Laporan Operasional, LAK, dan CALK yang harus memenuhi standar SAKIP. SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) mendukung hal ini dengan menghasilkan laporan otomatis dan terintegrasi dengan perencanaan kinerja (Renja SKPD) untuk membandingkan target dan realisasi. Laporan keuangan tersebut harus relevan, andal, dan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Aspek terpenting pada akuntabilitas pengelolaan anggaran berbasis SIPD terbagi menjadi 2 kategori. Pertama, akuntabilitas vertikal ialah pertanggungjawaban kepada otoritas lebih tinggi (Kemendagri, BPK) melalui laporan standar (LRA, LKPD). Kedua, akuntabilitas horizontal ialah pertanggungjawaban kepada masyarakat dan DPRD melalui audiensi publik atau LKPJ, dengan data SIPD sebagai bukti. Dalam konteks Dinas Perhubungan, pengelolaan anggaran harus patuh terhadap regulasi, di mana pengelolaan anggaran harus sesuai peraturan, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Serta laporan keuangan yang harus berkualitas, di mana laporan keuangan tersebut harus akurat, lengkap, tepat waktu, dan dapat diakses publik. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran dapat ditingkatkan melalui audit independen oleh BPK, mekanisme pengaduan publik untuk melaporkan penyimpangan, dan evaluasi kinerja berkala terhadap pencapaian target.

3. METODE PENELITIAN

Untuk menjelaskan dan menganalisis lebih dalam terkait permasalahan dan penelitian tersebut, maka peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif suatu fenomena, peristiwa, atau kondisi berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menerapkan teknik purposive sampling dengan memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan dan fokus penelitian. Teknik purposive sampling ini digunakan untuk memilih informan kunci yang memiliki pengetahuan mendalam tentang pengelolaan anggaran melalui pemanfaatan SIPD, serta terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran.

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi data (observasi, wawancara, dan dokumentasi) untuk memahami proses, hambatan, dan dampak penerapan SIPD terhadap prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang berfokus pada Bidang Perhubungan Laut dan ASDP (Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan). Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan menggunakan instrumen pertanyaan yang relevan dengan fokus penelitian. Sementara data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen yang telah diolah pihak lain, meliputi literatur buku, artikel berita, dan publikasi jurnal ilmiah yang terkait dengan topik penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi

Pengelolaan anggaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, khususnya Bidang Perhubungan Laut dan ASDP, dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman jangka menengah. Setiap tahun, Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA), yang kemudian diinput ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk dievaluasi oleh Tim Anggaran Perangkat Daerah (TAPD). Hasil evaluasi berupa Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menentukan apakah anggaran perlu direvisi, ditambah, atau dikurangi. Setelah melalui proses asistensi dan persetujuan, RKA yang telah disesuaikan berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang kemudian dibahas dalam Sidang Paripurna bersama DPRD. Jika disetujui, DPA diajukan ke pemerintah provinsi untuk mendapatkan persetujuan Gubernur sebelum akhirnya dapat direalisasikan.

Pelaksanaan anggaran dilakukan melalui Layanan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik (LPSE), di mana kegiatan konsultasi dengan nilai di atas Rp50 juta dan kegiatan fisik di atas

Rp200 juta harus melalui proses lelang, sementara nilai di bawahnya dapat ditunjuk langsung. Dengan adanya SIPD dan LPSE, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, mendukung pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih terarah dan terukur. Sistem ini juga memperkuat prinsip good governance dengan meminimalisasi intervensi manusia dan potensi penyimpangan anggaran.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung di lapangan, implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan anggaran, khususnya dalam integrasi perencanaan hingga pelaporan. Namun, transformasi ini belum optimal akibat beberapa tantangan, seperti ketiadaan komponen standar harga dalam SIPD yang mengakibatkan penolakan dokumen RKA. Tanpa acuan harga baku akan mengakibatkan penyusunan RKA menjadi tidak terstandarisasi. Permasalahan ini mencerminkan kesenjangan antara desain sistem dan implementasi praktis, di mana sistem digital justru menjadi penghambat ketika data tidak terupdate dan terintegrasi dengan baik. Keadaan ini menekankan bahwa kegunaan dan kemudahan sistem menentukan keberhasilan dari penerapannya. Masalah-masalah ini menghambat penyerapan dan realisasi anggaran, mengurangi akuntabilitas, serta menghambat pembangunan infrastruktur transportasi.

Tantangan selanjutnya yaitu adanya perubahan spesifikasi teknis, hal ini diakibatkan perubahan harga material di lapangan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang ada pada anggaran. Sehingga berakibat pada batalnya proses pembangunan secara khusus pada pembangunan infrastruktur yang memerlukan bahan material yang banyak. Selain itu, proses lelang yang lambat, revisi dokumen berulang, dan perencanaan anggaran yang tidak realistis berdampak langsung pada rendahnya realisasi anggaran, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur perhubungan seperti pembangunan terminal, pengadaan rambu lalu lintas, atau pengembangan sistem transportasi cerdas. Hal ini akhirnya akan menghambat pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi dalam mendukung mobilitas dan konektivitas wilayah.

Lemahnya koordinasi antara dinas dengan Tim TAPD dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) memperparah inefisiensi, sementara ketidaksiapan data dan analisis risiko memperlambat proses. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Balqis et al., 2021) yang menyoroti peran krusial faktor SDM dan prosedur di samping teknologi. Untuk meningkatkan efektivitas SIPD, diperlukan langkah strategis seperti memperkuat integrasi data, meningkatkan koordinasi antarstakeholder, menyederhanakan prosedur lelang, serta

memastikan perencanaan berbasis data riil dan partisipasi publik. Dengan demikian, anggaran dapat menjadi alat pembangunan yang efisien dan akuntabel, mendukung layanan transportasi yang lebih baik.

Berdasarkan hasil riset tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa benar adanya SIPD tersebut membuat pengelolaan anggaran menjadi lebih terintegrasi dan sistematis. Namun, dalam praktiknya belum berjalan secara optimal akibat beberapa tantangan yang menjadi hambatannya. Tantangan tersebut bersumber baik dari segi SDM maupun dari segi sistemnya sendiri.

Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Anggaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi Periode 2021-2024

Sebuah kebijakan tidaklah bermakna dan bermanfaat dengan optimal jika tidak terimplementasikan dengan baik oleh para implementor atau pelaksana kebijakan itu sendiri. Sama halnya dalam implementasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dalam pengelolaan anggaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Dalam konteks ini Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi sebagai pengelola anggaran publik di sektor transportasi bertugas mulai dari perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pemantauan realisasi, hingga pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan kepada publik. Sebagai institusi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan ini, dalam proses pelaksanaannya harus memperhatikan berbagai hal, sehingga proses implementasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dalam pengelolaan anggaran sebagai upaya mewujudkan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dapat terlaksana secara efektif, serta tercapai tujuan dan Sasarannya.

Namun, pada praktik di lapangan masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang ditemukan terkait implementasi SIPD di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Untuk menjawab semua dugaan awal peneliti yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn untuk menjawab permasalahan implementasi SIPD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Terdapat 6 variabel yang dapat menentukan keberhasilan implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn meliputi Standar dan tujuan kebijakan (*policy standards and objectives*), Sumber daya (*resources*), Komunikasi antar organisasi (*interorganizational communication*), Karakteristik agen pelaksana (*characteristics of implementing agencies*), Kondisi sosial, ekonomi, dan politik (*social, economic, and political conditions*), Disposisi pelaksana (*disposition of implementers*).

Standar dan Tujuan Kebijakan (Policy Standards and Objectives)

Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi telah memenuhi standar kebijakan berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019, khususnya dalam hal ketepatan waktu pelaporan, akurasi data, dan pemanfaatan untuk perencanaan pembangunan sektor transportasi. SIPD berhasil mendorong transparansi melalui publikasi data real-time dan integrasi proses perencanaan hingga pelaporan anggaran. Namun, pada awal penerapannya pada tahun 2019, fitur pelaksanaan anggaran belum lengkap, sehingga masih bergantung pada aplikasi SIMDA. Baru pada tahun 2021, semua fitur SIPD tersedia secara optimal, memungkinkan penggunaan yang lebih efisien. Meskipun tujuan kebijakan seperti transparansi dan akuntabilitas tercapai, keterlambatan optimalisasi fitur menunjukkan kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi teknis. Hal ini menegaskan pentingnya kesiapan sistem dan pemahaman aparatur pengguna untuk mencapai standar kebijakan secara efektif, sejalan dengan prinsip governansi digital dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber Daya (resources)

Implementasi aplikasi SIPD sangat bergantung pada kualitas sumber daya, termasuk anggaran, SDM, teknologi, dan infrastruktur. Meskipun SDM di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, khususnya Bidang Perhubungan Laut dan ASDP, dinilai sudah kompeten dalam mengoperasikan SIPD, masih terdapat kendala dalam penggunaannya. Aplikasi ini dianggap rumit oleh sebagian aparatur, menyebabkan resistensi karena preferensi terhadap sistem lama yang lebih familiar. Selain itu, proses penginputan data secara online yang dilakukan bertahap menimbulkan keluhan, meskipun SIPD sebenarnya mampu mempercepat dan mempermudah pekerjaan. Dengan demikian, meskipun sumber daya manusia secara teknis memadai, tantangan utama justru terletak pada adaptasi pengguna terhadap perubahan sistem, yang menghambat optimalisasi implementasi SIPD. Hal ini menunjukkan pentingnya pelatihan berkelanjutan dan pendekatan yang lebih *user friendly* untuk meningkatkan penerimaan aplikasi di kalangan pegawai.

Komunikasi Antar Organisasi (interorganizational communication)

Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa komunikasi antarorganisasi, khususnya antara Dinas Perhubungan, Bappeda/Bappelitbangda, dan BPKAD, berjalan cukup efektif dalam hal koordinasi dan pertukaran informasi. Hal ini didukung oleh adanya regulasi yang jelas, penunjukan petugas khusus untuk penginputan data, serta evaluasi tahunan terkait penggunaan SIPD. Namun, penelitian ini juga mengungkap kendala signifikan, yaitu belum terinputnya komponen standar harga ke dalam aplikasi SIPD, yang berakibat pada ketidakterstandaran

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), inefisiensi anggaran, serta hambatan dalam proses pengadaan barang/jasa. Masalah ini berdampak pada tertundanya lelang, melemahnya akuntabilitas perencanaan, dan menurunnya kepercayaan publik.

Berdasarkan hasil riset tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa komunikasi antara Dinas Perhubungan dengan Bappeda/Bappelitbangda dan BPKAD masih tergolong cukup lemah, karena koordinasi yang terjalin di dalamnya belum ada kejelasan konsistensi mengenai penggunaan aplikasi SIPD. Hal ini tentunya mengakibatkan munculnya kebingungan bagi para pengguna SIPD di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi.

Karakteristik Agen Pelaksana (characteristics of implementing agencies)

Karakteristik agen pelaksana merupakan serangkaian kapasitas birokrasi, struktur organisasi, dan budaya kerja yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) dalam dimensi karakteristik agen pelaksana dipengaruhi oleh beberapa indikator, salah satunya adalah keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP berperan sebagai tolok ukur kritis bagi organisasi dalam mencapai target yang ditetapkan. Dengan prosedur perencanaan yang tertata rapi dan program yang dikelola secara sistematis, suatu organisasi dapat menghasilkan keluaran (output) yang lebih optimal di masa mendatang.

Berdasarkan observasi awal, peneliti berpendapat dalam segi dimensi karakteristik agen pelaksana tidak terjadi hambatan sama sekali. Dikarenakan peneliti melihat bahwa kapasitas birokrasi, struktur organisasi, dan budaya kerja itu sendiri sudah dijelaskan secara rinci dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Hal ini berdasarkan hasil observasi yang menunjukkan bahwa proses pengumpulan data hingga pelaksanaan rapat evaluasi data pada SIPD, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi telah berpedoman pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Di mana di dalam peraturan tersebut termuat alur serta tata cara pelaksanaan SIPD.

Pada hakikatnya, karakteristik agen pelaksana dalam mengimplementasikan SIPD sangat berpengaruh besar. Oleh karena itu, karakteristik agen pelaksana sangat erat kaitannya dalam implementasi kebijakan. Hal ini di sebabkan, apabila karakteristik agen pelaksana ini tidak jelas, maka kebijakan yang akan diterapkan justru tidak akan berjalan bagaimana semestinya.

Oleh karena itu, berdasarkan temuan hasil penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi khususnya Bidang Perhubungan Laut dan ASDP dalam pelaksanaan SIPD didasarkan kepada tugas pokok dan fungsi, dan untuk mempercepat pelaksanaan SIPD tersebut diperkuat oleh Tim pendampingan, diharapkan

implementasi SIPD Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi dapat terlaksana sesuai target yang ditetapkan.

Dengan demikian, SIPD merupakan salah satu program teknologi informasi pemerintah yang bertujuan untuk menjamin transparansi informasi publik kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018, yang memuat ketentuan mengenai hak masyarakat atas akses informasi. Keterbukaan informasi publik berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan badan publik, termasuk segala kebijakan yang berdampak pada kepentingan umum.

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik (social, economic, and political conditions)

Kondisi sosial merujuk pada karakteristik masyarakat dan budaya organisasi yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan. Variabel ini mencakup 3 aspek penting, yakni: Tingkat literasi dan kesiapan SDM yang memiliki arti kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam mengadopsi dan beradaptasi terhadap inovasi kebijakan; Partisipasi stakeholders yang berarti menilai sejauh mana masyarakat dan kelompok terkait dilibatkan dalam proses kebijakan; Nilai dan norma yang bertujuan untuk menilai suatu kebijakan tersebut apakah sudah sesuai dengan budaya setempat atau justru bertentangan.

Kondisi ekonomi merujuk pada ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan. Variabel ini mencakup 3 aspek penting, yakni: Kecukupan anggaran yang bertujuan untuk menilai apakah dana publik dialokasikan secara memadai untuk infrastruktur, pelatihan, dan pemeliharaan sistem sehingga tidak adanya kesenjangan antara rencana anggaran dengan realisasi anggaran; Infrastruktur pendukung yaitu segala hal yang mendukung implementasi aplikasi SIPD seperti jaringan internet, perangkat keras, dan integrasi dengan sistem lain; Dampak efisiensi yang berarti menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu mengurangi pemborosan namun tetap mempertahankan kualitas demi mendapatkan output yang maksimal.

Sementara itu, faktor politik, seperti regulasi pendukung dan konflik kepentingan, berperan dalam memberikan legitimasi kebijakan. Dukungan politik melalui Perda atau instruksi resmi membantu mengurangi resistensi, meskipun tantangan tetap ada. Sinergi ketiga faktor ini, SDM yang kompeten, sumber daya memadai, dan dukungan politik pada akhirnya menciptakan lingkungan implementasi yang ideal, meningkatkan keberhasilan kebijakan secara keseluruhan.

Disposisi Pelaksana (disposition of implementers)

Menurut Van Meter dan Van Horn, disposisi pelaksana seperti komitmen, kejujuran, dan tanggung jawab merupakan faktor kunci dalam efektivitas implementasi kebijakan. Hal ini terlihat dalam studi kasus implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Dana (SIPD) di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, di mana para pelaksana kebijakan (seperti kepala dinas, kepala bidang, dan operator SIPD) menunjukkan respons positif, komitmen tinggi, serta kesesuaian dengan TUPOKSI. Meskipun tidak ada insentif (reward) yang diberikan kepada pengguna SIPD, para pegawai tetap menjalankan tugas dengan baik sesuai arahan. Namun, penelitian menyoroti pentingnya pemberian reward untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja, meskipun secara keseluruhan disposisi pelaksana dalam implementasi SIPD telah berjalan efektif.

Implementasi Prinsip Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Berbasis SIPD di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi periode 2021-2024

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, khususnya Bidang Perhubungan Laut dan ASDP dalam pengelolaan anggaran selalu berkomitmen untuk menerapkan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilaksanakan secara langsung di lapangan, berikut ini penjelasan mengenai implementasi prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran melalui pemanfaatan SIPD di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi.

Implementasi Prinsip Efisiensi dalam Pengelolaan Anggaran Berbasis SIPD

Implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah (SIPD) dalam pengelolaan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi telah meningkatkan efisiensi melalui integrasi seluruh tahapan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. SIPD meminimalkan pekerjaan berulang dengan memanfaatkan perencanaan berbasis data dan tepat waktu, sehingga mempercepat proses penyusunan dokumen seperti RKA dan DPA, dari yang sebelumnya manual memakan waktu berminggu-minggu menjadi hanya hitungan hari.

Selain itu, SIPD mengurangi human error dalam penghitungan dan alokasi anggaran berkat fitur integrasi datanya. Keunggulan lain SIPD adalah kemampuannya memantau realisasi anggaran secara real-time melalui dashboard yang dapat diakses oleh pihak terkait, sehingga mencegah under spending dan duplikasi anggaran. Dengan demikian, SIPD tidak hanya memangkas waktu dan biaya, tetapi juga meningkatkan akurasi dan pengendalian penyerapan anggaran, menjadikan pengelolaan keuangan lebih efektif dan transparan.

Implementasi Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Berbasis SIPD

Transparansi pengelolaan anggaran melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) dapat meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan seluruh proses anggaran secara digital, memudahkan pelacakan data, dan meminimalkan perbedaan informasi antar unit kerja. Masyarakat dapat mengakses informasi dasar melalui portal SIPD publik, sementara pemangku kepentingan memiliki akses penuh untuk memantau perencanaan, alokasi, dan pelaporan anggaran. SIPD juga mendukung integrasi data, seperti antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi dan BPKAD, sehingga mempermudah verifikasi dalam proses penganggaran, monitoring, dan pelaporan. Fitur pelaporan otomatis seperti LRA dan LKPD yang memenuhi standar akuntansi pemerintah membantu mengurangi risiko manipulasi data.

Namun, keterbatasan akses publik terhadap informasi rinci (seperti dokumen lelang atau revisi anggaran) serta lemahnya koordinasi antar instansi misalnya dalam input standar harga menjadi tantangan yang perlu diperbaiki. SIPD juga meningkatkan pengawasan melalui audit trail yang mencatat seluruh aktivitas pengguna, sehingga meminimalkan potensi korupsi. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang turut mendukung transparansi, meskipun partisipasi aktif masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, SIPD membantu mengidentifikasi indikasi penyimpangan anggaran, seperti duplikasi atau ketidaksesuaian perencanaan, sehingga mendukung pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel.

Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Berbasis SIPD

Pada akuntabilitas pengelolaan anggaran melalui penggunaan SIPD dapat dirasakan melalui pertanggungjawaban anggaran yang dilakukan secara lebih terstruktur dan digital mulai dari input perencanaan penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Setiap tahapannya terekam dalam sistem, dan semua transaksi memiliki jejak digital (audit trail) yang tidak dapat dihapus, sehingga memudahkan pihak TAPD dalam memverifikasi dan mengaudit. Penggunaan anggaran yang telah disetujui dan telah dilakukan penyerapannya pada setiap kegiatan yang terencana, di akhir periode akan diadakan audit internal oleh Inspektorat Daerah dan audit eksternal yang dilakukan oleh BPK. Data yang bersumber dari SIPD ini digunakan sebagai bahan pemeriksaan karena hasil tersebut mencerminkan transaksi secara riil, kronologis, dan dokumentatif terhadap seluruh pengelolaan keuangan daerah.

Aplikasi SIPD dinilai bermanfaat dalam menyederhanakan proses penyusunan laporan keuangan (LRA, LKPD, LPSAL, LO, LAK, dan CALK) untuk memenuhi standar akuntabilitas pengelolaan anggaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Di mana SIPD menyediakan template dan format yang sesuai dengan standar pemerintah, yang nantinya sistem ini secara otomatis akan menghasilkan dokumen seperti LRA, LKPD, LPSAL, dan lain-

lain berdasarkan data yang telah diinput sebelumnya, sehingga mempercepat dan menyederhanakan proses pelaporan. Hasil laporan dari SIPD. Keadaan ini tentunya telah memenuhi kriteria relevan, andal, dan dapat dibandingkan sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2022. Hal ini diperkuat melalui hasil wawancara peneliti dengan Bendahara Bidang Perhubungan Laut dan ASDP yang menyatakan bahwa, SIPD ini menyediakan informasi real time tentang realisasi anggaran. ini tentunya membantu Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi khususnya Bidang Perhubungan Laut dan ASDP mengevaluasi kinerja dan menyesuaikan alokasi dana. Selain itu, SIPD ini memungkinkan analisis cost-benefit untuk program seperti pembangunan Pelabuhan, sehingga anggaran dialokasikan ke proyek prioritas.

Laporan hasil dari SIPD dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi kepada publik, di mana laporan dari SIPD digunakan sebagai bagian dari bahan evaluasi dan pertanggungjawaban dalam forum seperti rapat komisi DPRD, laporan kinerja tahunan, serta publikasi ke masyarakat melalui portal SIPD publik atau website resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa SIPD berhasil meningkatkan relevansi (melalui data real-time), keandalan (via audit trail), dan keterbandingan (dengan format standar) laporan keuangan Dinas Perhubungan. Namun, tantangan seperti SDM yang kurang adaptif, revisi dokumen berulang, dan koordinasi antarinstansi yang lemah, perlu diatasi agar laporan keuangan benar-benar memenuhi tiga prinsip tersebut. Untuk itu upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam mengatasi permasalahan ini dengan cara melakukan sosialisasi SIPD secara berkala kepada pegawai untuk mengurangi kesalahan input, memperhatikan integrasi database standar harga ke SIPD untuk meminimalkan revisi anggaran. Dan melakukan peningkatan akses publik ke laporan keuangan guna memperkuat akuntabilitas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang dalam pembahasan, peneliti menyimpulkan hal-hal berikut mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan anggaran sebagai upaya mewujudkan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi khususnya Bidang Perhubungan Laut dan ASDP:

- a. Pengelolaan anggaran melalui pemanfaatan SIPD telah mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan anggaran. Namun, tantangan seperti keterlambatan proses lelang, revisi dokumen berulang, dan ketidakrealistisan perencanaan anggaran masih menghambat efektivitas pengelolaan anggaran. Komponen standar harga yang belum terinput ke dalam SIPD juga menyebabkan penyusunan RKA menjadi tidak terstandarisasi.
- b. Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) telah berhasil di implementasikan di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, khususnya di Bidang Perhubungan Laut dan ASDP. SIPD berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Namun, masih terdapat resistensi dari sebagian aparatur yang lebih nyaman menggunakan sistem lama karena faktor kebiasaan dan ketidaknyamanan terhadap perubahan. Selain itu, pelatihan intensif sebelum implementasi SIPD terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman aparatur. Namun, sebagian kecil aparatur masih memerlukan pendampingan khusus dan pelatihan ulang (refresher) untuk mengatasi kesulitan beradaptasi dengan sistem baru.
- c. Pengelolaan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi melalui pemanfaatan SIPD berperan aktif dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
 - 1) Pada prinsip efisiensi, SIPD berperan signifikan dalam meningkatkan efisiensi dengan mengintegrasikan seluruh proses anggaran mulai dari perencanaan hingga pelaporan dalam satu sistem terpusat. Keberhasilan ini tercermin dari pemangkasan waktu penyusunan dokumen dari manual menjadi digital. SIPD pun berperan dalam pengurangan human error (kesalahan manual) dalam perhitungan anggaran. Serta dengan adanya SIPD, pemantauan anggaran dilakukan secara real time melalui dashboard SIPD yang bertujuan untuk menghindari under spending.

- 2) Pada prinsip transparansi, SIPD menyediakan sistem yang terdokumentasi dan dapat ditelusuri secara digital, meskipun akses publik masih terbatas. SIPD memudahkan integrasi data anggaran antar unit kerja, sehingga dapat menghindari perbedaan data dan memudahkan verifikasi. Serta memudahkan proses pelacakan aktivitas pengguna (audit trail) yang mencatat setiap perubahan atau transaksi, sehingga mampu mengurangi potensi korupsi. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses informasi yang rinci terkait pengelolaan anggaran bagi masyarakat masih perlu diperbaiki.
- 3) Pada prinsip akuntabilitas SIPD mendukung akuntabilitas melalui audit trail dan laporan keuangan secara otomatis (LRA, LKPD, LPSAL) yang memenuhi standar pemerintah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa tantangan seperti rendahnya kompetensi SDM dan resistensi aparatur terhadap perubahan sistem, keterbatasan fitur SIPD, lemahnya koordinasi Dinas Perhubungan dengan TAPD dan ULP menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran, serta kendala administratif seperti revisi dokumen berulang dan keterlambatan pencairan dana menyebabkan akuntabilitas SIPD berjalan kurang optimal.

Berdasarkan peneitian yang sudah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi perlu adanya upaya dalam peningkatan kapasitas SDM, dengan melakukan pelatihan berkala bagi aparatur dalam mengoperasikan SIPD, termasuk sosialisasi fitur-fitur baru. Selain itu, perlu adanya inisiatif seperti memberikan insentif atau reward kepada pegawai yang berkinerja baik dalam penggunaan SIPD untuk meningkatkan motivasi para pelaksana SIPD. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi harus berupaya dalam memastikan komponen standar harga terinput secara lengkap dan akurat ke dalam SIPD untuk menghindari penolakan RKA. Mengoptimalkan integrasi SIPD dengan sistem lain seperti aplikasi LPSE untuk memperlancar proses lelang dan pengadaan barang/jasa.
- b. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi bersama tim TAPD Kabupaten Sukabumi perlu adanya upaya dalam penguatan koordinasi, dengan meningkatkan komunikasi antara Dinas Perhubungan dengan BPKAD/Bappeda, terutama dalam sinkronisasi data dan penyelesaian kendala teknis. Lalu membentuk tim pendamping khusus untuk membantu unit kerja yang mengalami kesulitan dalam penggunaan SIPD.

- c. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi perlu adanya upaya dalam peningkatan transparansi dan partisipasi publik, dengan memperluas akses masyarakat terhadap informasi anggaran melalui portal SIPD atau website resmi dinas. Selain itu, berupaya dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam Musrenbang untuk menyelaraskan anggaran dengan kebutuhan riil. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi perlu melakukan evaluasi perencanaan anggaran, dengan melakukan survei dan analisis kebutuhan secara mendalam sebelum menyusun anggaran untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi lapangan. Memperkuat analisis risiko untuk mengantisipasi perubahan harga material atau kebijakan yang memengaruhi realisasi anggaran. Sehingga, dengan upaya perbaikan tersebut akan meningkatkan audit dan pengawasan melalui pemanfaatan fitur monitoring SIPD untuk mengidentifikasi keterlambatan penyerapan anggaran sejak dini. Melakukan audit internal secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan menghindari penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Balqis, N., & Fadhly, Z. (2021). Efektivitas penerapan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, 7(2), 117. <https://doi.org/10.35308/jpp.v7i2.4246>
- Balqis, N., Fadhly, Z., & Az, M. (2021). Implementasi aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1), 146–161. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1953>
- Darmawan Sutisna, I., Dwiputrianti, S., Rahman Bkad, A., Bandung, K., Stia, P., & Bandung, L. (2022). Model implementasi penyusunan anggaran belanja pada sistem informasi pemerintahan daerah di Kota Bandung. *Journal of Regional Public Administration (JRPA)*, 7. <https://bandung.sipd.kemendagri.go.id/daerah>
- Hendra, A., & Marja Sinurat, D. (n.d.). Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. <https://doi.org/10.33701/jmb.v5i1.3389>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik-Edisi terbaru* (Mardiasmo, Ed.). Andi. <https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Maulani, A., Isa Anshori, M., Andriani, N., & Kunci, K. (2024). Inovasi teknologi dalam pemerintahan: Implementasi SIPD sebagai alat untuk mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan daerah (Vol. 7, Issue 2). <http://Jiip.stkipyapisdompu.ac.id>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2022. (n.d.).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. (n.d.).

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021. (n.d.). www.peraturan.go.id
- PP Nomor 12 Tahun 2022. (n.d.).
- Putri, D. A. T. N. A. T. P. (2025). Evaluasi penerapan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam pelaksanaan laporan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. 5.
https://www.researchgate.net/publication/387906217_ARTIKEL_EVALUASI_PENERAPAN_SISTEM_INFORMASI_PEMERINTAHAN_DAERAH_SIPD_DALAM_PELAKSANAAN_LAPORAN_KEUANGAN/link/6781cdc58210a977a181ef5f/download?tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif* (Sugiyono, Ed.). 2022.
<https://www.scribd.com/document/691644831/Metode-Penelitian-2022-SUGIYONO>
- Teken, I. K. A., & Romarina, A. (2024). Efektivitas penerapan sistem informasi pemerintahan daerah terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota Denpasar. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(2), 111–123. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i2.4419>
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. (n.d.).
- Vitriana, N., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis penerapan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *DIGIBIS: Digital Business Journal*, 1(1). <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/digibis64>